

Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "*Dar'û al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih*"

Nadirsah Hawari¹, Agustam²

¹UIN Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin Bandar Lampung

²UIN Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin Bandar Lampung

Email : nadirsahhawari@radenintan.ac.id , dmstours68@gmail.com

Abstract

Abstract: This paper discusses the pattern of Islamic political parties' approach to political marketing ahead of the 2019 legislative election in Lampung. This discussion is considered important considering that a political party must continue to maintain its electability on the political stage so that it can continue to be strong in parliament, both central and regional, especially ahead of the 2024 elections. What is meant by progressive Islamic parties in this study is an Islamic party that has a vision, and mission Islam is good and able to adapt quickly to all changes and demands of the times. The problem is, sometimes the spirit to win elections forces party elites or candidates for councillors to justify all means to win and get seats. In the rules of Islamic jurisprudence and political Islam, rejecting harm should take precedence over taking issue (*dar'û al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*) when there is a conflict between the two. The harms of the breakdown of the electoral system and democracy because of the deviant behavior of politicians and the benefit of winning elections must be measured with the right scales. This research is in the form of a field study of elites and candidates from PKS and PAN in Lampung with data sources in the form of questionnaires and interviews. This study assesses progressive Islamic parties' efforts in upholding their interests and democratic values. The results of the study found that both PAN and PKS had special strategies to market their respective parties during the 2019 elections such as door-to-door actions, character friendships, delivery of vision and mission, and not unwilling to engage with pragmatic campaign practices such as other parties and candidates because it is considered a mafsadah (damage) in democracy.

Keywords: political marketing, Islamic parties, progressive, election, Lampung

Abstrak

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang pola pendekatan partai politik Islam dalam marketing politik menjelang pemilu legislatif tahun 2019 silam di Lampung. Bahasan ini dinilai penting mengingat sebuah partai politik memiliki keharusan untuk terus menjaga elektabilitasnya di pentas politik agar bisa terus kokoh di parlemen baik pusat maupun daerah terutama menjelang pemilu tahun 2024. Yang dimaksud dengan partai Islam progresif dalam penelitian ini adalah partai Islam yang memiliki visi, misi keislaman yang baik dan mampu beradaptasi secara cepat dengan segala perubahan dan tuntutan zaman. Masalahnya, terkadang semangat untuk menang pemilu memaksa elit partai atau calon anggota dewan menghalalkan segala cara agar menang dan dapat kursi. Dalam kaidah hukum ushul fiqih dan politik Islam, menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mengambil masalahat (*dar'û al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*) ketika ada pertentangan diantara keduanya. Mudarat rusaknya sistem pemilu dan demokrasi karena adanya perilaku menyimpang dari politisi dan masalahat menang pemilu harus ditakar dengan timbangan yang tepat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat

sejauhmana usaha partai Islam progressif dalam menjalankan visi menjaga maslahatnya buat partai itu sendiri dan juga kehidupan demokrasi secara umum. Penelitian ini berupa kajian lapangan terhadap elit dan calon dari PKS dan PAN di Lampung dengan sumber data berupa angket dan wawancara. Hasil penelitian mendapati bahwa baik PAN dan PKS keduanya memiliki strategi khusus untuk memasarkan partai masing-masing saat pemilu tahun 2019 silam seperti aksi door to door, silaturahmi tokoh, penyampaian visi misi dan tidak mau terlibat dengan praktik kampanye pragmatis seperti partai dan calon lain karena hal itu dianggap sebagai *mafsadah* dalam berdemokrasi.

Kata Kunci: marketing politik, parpol Islam, progressif, pemilu, Lampung

Pendahuluan

Setiap partai politik selalu berusaha mencari dan memanfaatkan peluang pemilu agar tetap kokoh dan dinamis seiring dengan perkembangan demokrasi baik di level nasional maupun lokal tak terkecuali Provinsi Lampung. Diantara peluang yang kerap dijadikan objek pemanasan mesin politik oleh para elit adalah momentum pemilu baik nasional maupun lokal. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauhmana tingkat capaian popularitas sekaligus elektabilitas sebuah parpol di masyarakat terutama pilkada yang melibatkannya banyak simpul massa dan jejaring pemilih baik legislatif maupun eksekutif. (Sofyan, 2014, pp. 32–33)

Hajatan besar negara sekelas pemilihan presiden dan wakil presiden pun juga dimanfaatkan para elit partai untuk mendulang popularitas dan elektabilitas partai guna sukses dalam momentum pemilu legislatif tak terkecuali pilpres 2019 silam. Ikut bergabung dalam koalisi pemilihan presiden diharapkan mampu menambah limpahan elektoral (*coat tail effect*) bagi sebuah partai politik termasuk partai Islam yang akhirnya mendorong para pengurus partai untuk terlibat aktif dalam hiruk pikuk pesta akbar demokrasi baik sebagai pengusung maupun pendukung. Namun begitu, hasil riset menunjukkan bahwa tidak semua partai yang ikut dalam proses dukung-mendukung calon presiden dan wakil presiden mendapat berkah elektoral dari proses tersebut. Faktanya, hanya beberapa gelintir partai saja yang mendapat limpahan berkah elektoral semisal PDIP, Golkar, PKB dan Nasdem sedangkan partai lain seperti PAN, PKS dan Gerindra justru tidak merasakan dampak yang signifikan.

Sulitnya partai Islam di tingkat lokal tak terkecuali Lampung untuk menambah jumlah perolehan kursi dewan daerah disebabkan oleh banyak faktor terutama sengitnya kompetisi, isu *money politic*, dan juga soliditas internal parpol yang kerap muncul menjelang pemilu. Keadaan semakin memburuk manakala kepercayaan publik kepada parpol terutama aleg semakin menipis. Selain isu disharmonisasi internal pengurus juga disinyalir ada stigma negative masyarakat terjadi anggota legislatif (aleg) yang dinilai lebih mementingkan partainya daripada rakyat sendiri yang sudah memilih mereka bahkan menurut Lindawati rakyat tidak pernah merasa berhutang budi apapun. (Suwandi Sumartias, 2017, p. 44)

Menjelang digelarnya pemilu serentak tahun 2019 Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterpa persolan internal yang serius dimana konflik antar elit terjadi yang merembet pada tingkat soliditas pengurus dan kader. Disisi lain keduanya juga memiliki agenda yang sama yaitu memenangkan calon presiden Prabowo-Sandi ditengah sulitnya melawan incumbent dan polarisasi masyarakat yang sangat kuat saat itu. Bagi PAN, ini bukan ujian ringan tetapi kuatnya jaringan, serta figur caleg yang diusulkan partai berlambang matahari ini terlihat cukup menjanjikan. Begitu juga bagi PKS, retaknya hubungan antara pendukung Anis Matta (Garbi) dan Sohibul Iman (pengikut setia PKS) terasa begitu

Nadirsah Hawari¹, Agustam²

Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “*Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih*”

kuat sampai ke daerah dan menguras energi dan mengganggu konsentrasi elit PKS disaat mereka juga harus sukses pemilu legislatif dan pilpres.

Hari hari kampanye yang sulit itupan dilalui oleh PAN dan PKS dengan segala cara dan strategi marketing partai serta asset politik yang dimiliki. Kampanye massal baik dialogis, tertutup dan terbuka ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit tidaklah mudah. Pada tataran politik lokal Lampung, PAN cukup diuntungkan oleh adanya tokoh nasional yang merupakan Ketua Umum PAN yaitu Zulkifli Hasan dan beberapa kepala daerah yang sukses menjadi bupati/walikota yang didukung oleh PAN seperti Bupati Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Tengah dan Pesisir Barat menjadi ujung tombak penguat elektabilitas partai. Sedangkan bagi PKS, pemilu saat itu betul-betul terasa sulit, minim caleg yang mau diajukan karena banyak yang mengundurkan diri dan bergabung dengan Garbi. Namun begitu, PKS tetap begerak menyapa masyarakat dengan segala cara yang dimiliki, amunisi terbatas ditengah arus politik pragmatis yang kian menguat.

Bagi PAN dan PKS sukses pemilu bukan sekedar bertambahnya jumlah kursi dan menguatnya dukungan publik tetapi kemenangan adalah ketika sebuah cita-cita mulia sudah disampaikan, proses kampanye cerdas sudah dijalankan dan masyarakat sudah diajak bicara tentang realita bangsa dan realitas panggung politik demokrasi terkini maka pada akhirnya semua akan diserahkan kepada pemilik suara yaitu pemilih itu sendiri. Bagi kedua partai ini, menyelamatkan partai dari zona degradasi adalah sebuah keharusan dan masalah utama bagi pengurus dan elit partai tetapi meraih kemenangan dengan menghalalkan segala cara juga adalah sebuah kenafian dan musibah serta *mafsadah* yang harus ditinggalkan. Dari sini muncul satu pertanyaan utama dalam penelitian ini sejauh mana usaha elit dan caleg PAN dan PKS untuk tetap menghadirkan kemaslahatan bagi partainya dengan cara bertambah suara dan kursi namun disisi lain tidak merusak nilai mulia demokrasi itu sendiri. Karena bai PAN dan PKS yang termasuk partai yang dinilai cukup konsisten dalam memperjuangkan amanat reformasi bahwa praktik KKN adalah *mafsadah* yang harus ditolak sekuat tenaga tak terkecuali di panggung politik praktis.

Bagi PAN konsepsi dan penerapan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih* bukan barang anyar karena partai ini dilahirkan oleh ilmuan Islam baik dari dalam dan maupun luar negeri dan didukung oleh ormas Muhammadiyah. Begitupun bagi PKS, kaidah ini adalah menu harian mereka dalam berdakwah dan menyampaikan pesan politik yang selama ini mereka yakini. Masalahnya, apakah persoalan penerapan kaidah semudah memahami kaidah dalam dunia politik pragmatis seperti saat ini?

Kaidah *Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih* banyak dibahas oleh para ulama Islam khususnya di bidang Ushul Fiqh atau Kaidah Fiqhiyah seperti al- 'Izz bin Abdissalam dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al- 'Anam*. Menurutnya, mengenal kemaslahatan urusan dunia mudah dicerna dengan akal fikir manusia dan bahwa setiap kemaslahatan yang lebih kuat harus diutamakan dari yang sekedar ada maslahat. Begitupun *mafsadah*, menurutnya semua *mafsadah* adalah buruk dan mengutamakan kerusakan yang ringan keatas kerusakan fatal adalah terpuji. (Abdissalam, 1991, p. 5). Menurut Imam al-Qarafi dalam kitabnya *Anwar al-Buruq fi 'Anwa' al-Furuq*; "lazimnya sebuah tahrir (pelarangan) mengandung *mafsadah* dan perintah wajib mengandung kemaslahatan, dan perhatian syari'at serta uqala' (orang berakal) akan lebih kuat menolak kerusakan ketimbang mengambil kemaslahatan manakala keduanya bertemu dalam satu kepentingan". (al-Qarafi, 1367, p. 212).

Penerapan kaidah mashlahah dan mafsadah tidak serta merta mengutamakan aspek mafsadah daripada masalah ketika antara keduanya memiliki rentan perbedaan yang cukup nampak dan terukur. Karena menurut Imam al-Subki dalam kitabnya al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj; “kita menolak orang yang selalu memenangkan aspek mafsadah dalam kondisi dimana masalah lebih kuat. Karena penerapan kaidah ini adalah ketika antara aspek mafsadah setara dan sebanding dengan aspek masalah maka pada saat itulah kaidah *dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih* baru bisa diterapkan.”(al-Subki, 1995, p. 65).

Secara lebih rinci Abdissalam merinci masalah menjadi tiga mengacu kepada realitas hukum dan fakta sosial dimana ada kemasalahatan yang memang sudah dipatok oleh doktrin agama seperti masalah mengangkat derajat sosial kaum dhu’afa dengan adanya kewajiban zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan *mafsadah mahdhah* adalah mudarat yang timbul dari sebuah tindakan yang dilakukan seperti hilangnya akal sehat dampak dari meminum khamr, hilangnya kehormatan diri dengan adanya zina dan *qazf* (tuduhan zina). Dan yang ketiga muwazanah antara *mashlahah* dan *mafsadah* (membandingkan antara kadar masalah dan kerusakan) seperti terpaksa seseorang memakan benda haram semisal babi ketika dalam keadaan sangat darurat yang mengancam keselamatan jiwa. Dalam hal ini, masalahnya adalah menjaga jiwa dan sedangkan mafsadatnya adalah memakan babi hukumnya haram. Disini seorang mujtahid menimbang kekuatan masalah dan *mafsadah* antara memakan benda haram atau menyelamatkan jiwa. Pendapat semacam ini juga diperkuat oleh ulama lain seperti Imam al-Syathibi(al-Syathibi, 1997, p. 466) dan Muhammad al-Zuhaili.(al-Zuhaili, 2006, p. 200).

Kajian tentang praktik politik, kampanye politik dan marketing politik di pentas demokrasi Indonesia adalah lumbung kajian yang sangat menarik dan bisa dilihat dari berbagai sudut dan perspektif mulai dari sudut konstitusi negara maupun agama tak terkecuali dari sudut pandang ahli politik Islam maupun ulama fiqh dan ushul fiqh yang sudah sampai pada derajat mujtahid. Disini, peneliti sudah mencoba melihat sejauhmana para peneliti sebelumnya yang sudah menuangkan gagasan dan ide cemerlang tentang problematika politik nasional dalam bingkai kaidah hukum Islam dan hasilnya masih nihil. Beberapa studi sudah dilakukan terkait dengan tema pola komunikasi dan strategi parpol dalam menghadapi pemilu seperti Sumartias dan Erfina Nurussa’adah yang secara khusus membahas langkah kongkrit PKS untuk menghilangkan stigma militan menjelang pemilu 2019 dan diterbitkan oleh Jurnal Politica. Nadirsah Hawari, dengan tema Menelisik Strategi PKS Tulang Bawang pada pemilu tahun 2019 yang dimuat di Jurnal TAPIS UIN Lampung.(Hawari, 2020, p. 2)Begitu juga Larasati dan Suryanef yang membahas tentang strategi Partai Amanat Nasional dalam memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 di Pasaman yang dipublikasi jurnal of Civic Education.(Suryanef, 2018a, p. 319). Lebih khusus lagi Muhammad Zuhdi dari UIN Palembang meneliti Strategi Kampanye Caleg Kaigus Ishak (PAN) dan Syafruddin (PPP) dalam pileh 2019 di Kota Palembang yang dipublikasi jurnal Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization.(Zuhdi, 2021, p. 55) Dari kemua riset yang dilakukan menyoyal langkah strategis PAN dan PKS dalam pemenangan pemilu 2019 silam secara umum kesemuanya lebih fokus pada aspek pendekatan edukatif parpol dan caleg ketimbang bicara dampak tambahan elektoral dari koalisi pilpres mengusung Prabowo-Sandi.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana cara dari kedua elit parpol baik PAN maupun PKS melakukan proses marketing politik di masa

kampanye yang terkesan banyak terjadi praktik KKN, bagaimana penerapan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*? Ada dua perkara yang sama-sama dianggap penting yaitu; menjaga keberlangsungan partai dengan cara massif dan sistemik serta adaptif dengan kondisi masyarakat yang sedang sulit ataukah tetap bertahan pada idealita politik dan misi perjuangan walau harus berhadapan dengan kenyataan pahit di tengah ketatnya persaingan dan kuatnya goncangan internal kedua parpol saat itu? Marketing politing bukan hanya bicara tentang cara memasarkan sebuah ide, produk dan cita-cita politik sebuah partai kepada masyarakat saat kampanye atau di luar masa kampanye namun marketing politik sesungguhnya bicara tentang substansi dari sebuah edukasi politik yang mencerdaskan masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini berupa kajian deskriptif kualitatif yang berusaha menjelaskan tentang fenomena partai politik Islam progressif dalam memasarkan parpolnya di tengah gempitanya pesta demokrasi pada tahun 2019 silam. Teknik pengumpulan data berupa angket dan wawancara terstruktur kepada pengurus baik PAN maupun PKS di beberapa kabupaten/kota yang ada di Lampung. Penarikan kesimpulan dari analisa data menggunakan tehnik anallisa deskriptif komparatif antara gagasan kedua partai dan akan dikonfirmasi dan ditelaah dengan kacamata kaidah ushuliyah "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*" untuk menghasilkan jawaban yang tepat atas persoalan utama kajian.

Hasil dan Pembahasan

Tidak ada satu klausul hukum dalam mengklasifikan partai politik dengan label dan penamaan tertentu selain nama partai itu sendiri. Semua partai berstatus sama dengan fungsi bersama sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat. Pengelompokan itu muncul untuk memudahkan penamaan semata dengan pencirian yang sesuai pada atribut dan jatidiri parpol itu sendiri. Kita kerap mendengar ada partai nasionalis, partai nasionalis-religius dan partai Islam. Bahkan untuk partai Islam sendiri terbagi lagi dalam beberapa pengelompokan seperti partai Islam terbuka dan partai Islam tertutup, partai Islam progressif maupun partai Islam konservatif.

Pengelompokan diatas bukan sesuatu yang baru atau tidak mendasar karena menurut Esti ada tiga klasifikasi utama parpol Islam di Indonesia. Pertama partai Islam adalah sebuah partai yang didasarkan pada orientasi pembentukan negara Islam seperti yang pernah digagas oleh Masyumi di masa-masa awal Orla. Kedua, adalah partai yang menggunakan simbol-simbol Islam atau simbol-simbol yang dekat atau mengidentikan dengan Islam seperti bulan, bintang, Ka'bah atau huruf Arab, meskipun pondasinya tidak didasarkan pada Islam tetapi mengkombinasikan dengan paham "*isme*" seperti nasionalisme (Pancasila) atau sosialisme sebagai ideologinya. Ketiga, adalah partai dengan basis massa Islam, yang tidak menggunakan simbol Islam, mengkombinasikan Islam dengan ideologi lainnya sebagai fondasi atau orientasi politiknya dan tidak dapat dipisahkan dari komunitas Islam untuk bisa eksis di politik nasional terutama pada saat pemilihan umum. (Ekawati, 2015, p. 5)

Catatan kecil atas pandangan Esti menyimpulkan bahwa hal itu hanya sebatas pengelompokan semata yang dicirikan atas dasar tampilan umum partai politik dan tidak mengacu pada hal-hal yang sangat fundamental. Berbeda dengan Mayrudin yang lebih menyoroti akar historis, asas perjuangan dan pola gerakan dan

pendekatan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam sepanjang kiprah parpol Islam terutama di era reformasi saat ini. Menurutnya, ada kelompok konservatif, yaitu sebuah partai yang sangat kuat memegang ideologi, tidak mudah bergeming dengan reaksi bahkan sejajar dengan status quo dan sangat konservatis. Kelompok ini sangat anti terhadap sekularisasi negara sama kuatnya dengan partai nasionalis yang menolak gagasan islamisasi negara. Imbuhnya, partai model ini sudah tidak ditemukan lagi di era reformasi terutama sejak tahun 2014 setelah PKS menyatakan sebagai partai terbuka. Kedua, partai yang memiliki kecenderungan konservatif progressif dimana peran militan masih ada namun sudah bisa menerima kelompok lain dalam perjuangan bahkan tidak jarang juga menjalan kerjasama dengan pihak lain yang berseberangan secara ideologis seperti halnya koalisi PDI-P dengan PKS. Dan yang ketiga partai berhaluan progressif pragmatis yang siap merubah jati diri dan perjuangan demi sebuah tujuan teknis pragmatis terutama ketika bersentuhan dengan momentum besar sekelas pemilu dan pilkada. (Mayrudin, 2017, p. 177)

Pengelompokan diatas dapat membantu dalam memetakan komposisi partai Islam yang ada saat ini dimana kelompok konservatif bisa diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga Partai Bulan Bintang (PBB) walaupun non-parliamentary party. Dan yang kedua, partai progressif modernis yang diwakili oleh Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hanya saja antara progressif dan konservatif, keduanya memiliki irisan yang terkadang sulit untuk dipisahkan secara pasti. Perbedaan yang ada lebih kepada bahwa konservatif itu ltampilan luar saja, *fashion politic*, dan *politic approach* semata maka semua parpol Islam bisa masuk dalam katagori konservatif dan pada saat yang sama bisa dikatakan progressif.

Atas dasar itulah peneliti menganggap tidaklah berlebihan jika kemudian memakai istilah konservatif untuk melabelisasi partai PKB, PPP dan PBB mengingat ketiga partai ini kerap mengusung simbol-simbol agama dan akar historis perjuangan partai Islam konservatif di masa silam seperti yang sering disuarakan oleh Partai Bulan Bintang sebagai penerus perjuangan Masyumi. Sedangkan PKB dan PPP adalah mewakili Islam kultural mayoritas dari kalangan Nahdhiyyin yang memang kental sekali dengan semangat mempertahankan tradisi lama keagamaan.

Berbeda dengan Agus Riyanto, dia mengelompokkan partai Islam menjadi partai Islam formalistis yang secara formal mencantumkan Islam sebagai dasar ideologi atau asas partai dan yang kedua partai Islam substansialistik-simbolistik yang mencantumkan Pancasila sebagai ideologi partai tetapi menggunakan nilai-nilai, jargon atau simbol-simbol Islam dalam aktivitas partai dan/atau basis massa konstituen utamanya memiliki kedekatan dengan organisasi Islam tertentu. (Riyanto, 2020, p. 191)

Realitas Internal PAN dan PKS Lampung Menjelang Pileg 2019

Satu diantara persoalan klasik yang kerap menimpa partai politik adalah persoalan disharmonisasi pengurus baik di tingkat elit pusat maupun daerah tak terkecuali partai-partai yang berlogo Islam atau partai Islam. Diantara partai Islam yang kerap diterpa dengan isu disharmonisasi adalah Partai Amanat Nasional (PAN) terutama menjelang dihelatnya pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 silam. Menurut Putra Jaya Husin (Sekretaris Dewan Kehormatan), ia dan dua orang elit DPP PAN lainnya menyatakan mundur dari kepengurusan dikarenakan merasa tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Selain Putra,

Agung Mozin (Ketua Badan Cyber dan Multimedia) dan juga Nasrullah (Bendahara Umum) juga menyatakan hal yang sama. (Retaduari, 2018, p. 14)

Protes yang muncul terhadap Ketum PAN itu muncul setelah kader melihat ada sikap politik yang dimainkan oleh PAN dimana Zulkifli sebagai ketua merapat kepada kubu Jokowi bahkan mendapat jatah menteri sedangkan disisi lain politisi senior PAN sekaligus pendiri Amin Rais kerap menyampaikan kritiknya kepada Jokowi dalam berbagai forum sehingga langkah Ketum dianggap tidak sejalan dengan sikap politik PAN yang berkoalisi dengan Prabowo-Hatta. Manuver elite PAN menjelang pemilu 2019 dianggap membahayakan keberlangsungan partai itu sendiri sebagaimana disampaikan oleh Wahyudi Akmaliah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan cara ini kerap dimainkan oleh Amin guna mendongkrak elektabilitas partainya. (Rahadian, 2018, p. 12)

Selain isu diharmonisasi yang terjadi pada elit DPP PAN isu yang sama juga menimpa DPW PAN Lampung pasca OTT atas Ketua DPW PAN Lampung sekaligus Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. Harian Momentum tertanggal 13 November 2019 menurunkan berita bertahuk "Ketua PAN Lampung Dimosi Tidak Percaya" oleh sepuluh DPD PAN Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung diantaranya DPD: Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Tulangbawang Barat, Pesisir Barat, Tulangbawang, Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah dan Metro. Aksi ini juga didukung oleh beberapa Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung. Mosi tidak percaya elite wilayah PAN Lampung ini dipicu oleh sikap dan keputusan politik yang diambil oleh Irfan Nuranda Dja'far yang memecat beberapa Ketua DPD PAN di Lampung. (Editor Harian Momentum, 2019, p. 10)

Kisruh di internal PAN memang bukan kali pertama karena memang jauh sebelum ini partai berlogo matahari bersinar itu kerap dilanda polemik di internal atau simpatisan partai yang berujung pada keluarnya beberapa elit dan sebagiannya lagi merasa tidak puasa dengan visi misi perjuangan PAN kemudian membentuk partai baru seperti halnya Partai Matahari Bangsa (PMB) yang digagas oleh kaum muda Muhammadiyah karena menurut mereka hanya 10% saja warga Muhammadiyah yang loyal kepada PAN. (RH, 2008, p. 17) Kondisi tidak ideal diatas tentu sedikit menghambat derap langkah PAN menuju target politik dua digit sebagaimana yang diamanatkan hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas PAN III) di Bandung pada tang 23 Agustus 2017. (MHD, 2017, p. 8)

Isu disharmonisasi elit bukan hanya menimpa PAN tetapi juga menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara Kubu Anis Matta (Mantan Presiden PKS) dan Fahri Hamzah dengan elit DPP PKS yang berujung mundurnya banyak pengurus DPP dan DPD termasuk bacaleg dari gerbong besar PKS. Mahfulyono, Ketua DPD PKS Banyumas menyatakan mundurnya banyak kader PKS disebabkan oleh keputusan DPP PKS yang meminta semua kader untuk menandatangani fakta integritas dan loyalitasnya kepada struktur partai tanpa terkecuali. Menurut Awaluddin, loyalitas kader PKS tidak perlu diragukan lagi bahkan menurutnya ada banyak kejanggalan tentang instruksi tersebut. Namun hal ini ditampik oleh Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring yang menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar dan upaya penyegaran menjelang pemilu 2019 sekaligus menyiapkan tim yang lebih solid kedepannya. (Widiyanto, 2018, p. 8) Kisruh antara kubu Anis Matta yang dimotori oleh Fahri Hamzah berlanjut sampai ke meja pengadilan dan PKS dinyatakan bersalah memecat Fahri dan mengabdikan gugatan 30 miliar kepada PKS namun PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI dan tetap kalah. Akhirnya PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 Juni 2018

yang kemudian Hakim membatalkan gugatan Fahri Hamzah. (Admin Liputan6.com, n.d., p. 16)

Mundurinya beberapa tokoh dan elit DPP PKS juga menimpa beberapa DPW dan DPD PKS tak terkecuali DPW PKS Lampung seiring dengan munculnya ormas baru bernam Garbi yang disinyalir sebagai sempalan dari PKS. Kondisi ini tentu bukan angin segar bagi PKS yang sedang berusaha menaikkan angka elektoralnya menjadi dua digit tetapi juga menjadi ancaman dan hambatan di lapangan mengingat kader PKS juga terbatas.

Selain isu kisruh internal yang dihadapi oleh kedua partai Islam progressif PAN dan PKS, keduanya juga berada pada pusaran arus koalisi yang tidak mudah karena keduanya menjadi pendukung utama koalisi Prabowo-Sandi berhadapan dengan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin yang juga diusung oleh partai Islam lainnya yaitu PKB dan PPP.

Panasnya suhu kampanye pilpres 2019 dan fenomena tarik menarik antar kelompok masyarakat dampak dari dua kubu yang saling lempar isu termasuk isu SARA pada saat kampanye pilpres tentu saja membuat posisi PAN terutama PKS menjadi tidak mudah. Pada satu sisi, ada dukungan politik buat PAN dan PKS namun juga ada upaya untuk selalu mengaitkan antara keduanya dengan isu politisasi agama di panggung politik.

Hidup adalah perjuangan begitupun partai politik yang ingin tetap kokoh di panggung politik. Apapun masalah yang dihadapi tidak boleh membuat sebuah partai yang ingin tumbuh kembang berhenti melangkah dan berjuang begitupun dengan PAN dan PKS. Lalu, bagaimana langkah-langkah jitu yang dijalankan oleh elit dan mesin partai menuju sukses pemilu serentak 2019? Bagi PAN dan PKS, kemenangan pemilu serentak 2019 jauh lebih penting dari semua persoalan politik internal yang ada sehingga perlu ada upaya kongkrit dan terukur sebagai langkah strategis dengan pola komunikasi edukatif yang lebih baik dan mudah dimengerti oleh calon pemilih.

Marketing Politik PAN dan PKS dan Penerapan Kaidah Ushuliyah

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan marketing politik partai politik yang menjadi objek penelitian ini adalah upaya-upaya taktis strategis partai baik PAN dan PKS dalam memasarkan ide, gagasan, visi, misi, program politik unggulan partai kepada masyarakat terutama di saat kampanye legislatif. Kedua partai kerap menjanjikan beberapa program unggulan semisal pajak kendaraan motor gratis, mengembalikan subsidi BBM buat rakyat, pendidikan gratis yang kerap disampaikan oleh elit PKS dan PAN.

Sebelum peneliti memaparkan data lebih lanjut tentang strategi marketing politik PAN dan PKS saat pemilu 2019 di Provinsi Lampung ada baiknya kita simak sajian data hasil perolehan pemilu legislatif dibawah ini sebagai bahan acuan dalam membaca gerak langkah politik kedua parpol selanjutnya.

Tabel perolehan kursi DPR-RI dari DAPIL Lampung

No	Nama Partai	Pemilu 2014 (Juta/%)	Kursi	Pemilu 2019 (Juta/%)	Kursi
1	PDIP	711.346	3	887.416	4
2	Gerindra	538.643	3	488.838	2
3	Demokrat	470.776	2	491.786	2
4	Golkar	464.318	2	509.014	3
5	PAN	421.454	2	336.788	2
6	PKS	352.971	2	340.867	2

Nadirsah Hawari¹, Agustam²

Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “*Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih*”

7	PKB	333.767	2	433.087	2
8	Nasdem	304.419	1	365.723	2
9	Hanura	232.196	1	40.637	0
10	PPP	148.105	0	112.108	0
11	PBB	45.482	0	15.522	0
TOTAL			18		19

Data diperoleh dari KPUD Lampung

Ada dua fenomena unik dan menarik bagi peneliti dalam kaitan kajian strategi marketing politik partai Islam berdasarkan data diatas. Yang pertama, ada dua partai berhaluan konservatif progresif yaitu PPP dan PBB yang juga mengalami persoalan elektoral dan konflik internal berkepanjangan. Dan yang kedua adalah partai berhaluan progressif modernis yaitu PAN dan PKS yang juga mengalami nasib sama, ada penurunan suara dan konflik internal menjelang pemilu. Namun nasib dan nasab pemilu 2019 silam menjadi pembeda diantara keempat partai Islam tersebut dimana PAN dan PKS masih mendapat jatah kursi di DPR-RI untuk Dapil Lampung sedangkan PPP dan PBB sudah tidak mampu lagi meraih kursi sejak 2014 silam.

Pada kajian ini penulis fokus pada langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh elit PAN dan PKS sebagai partai berhaluan progressif untuk menguatkan dan menjaga eksistensi partainya dari zona degradasi dengan memakai pisau analisa kaidah ushuliyah berupa kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih* (menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan) ketika terjadi *conflict of intrests* terjadi saat melakukan proses kampanye dan pemasaran partai menjelang pemilu serentak saat itu. Kemampuan PAN dan PKS untuk tetap bertengger di posisi tengah patut diselidiki secara lanjut mengingat kedua sahabatnya PPP dan PBB justeru semakin tenggelam dengan isu yang sama.

Berdasarkan rekap capaian total kursi keempat partai Islam di Provinsi Lampung untuk seluruh kursi DPRD se-Lampung adalah seperti berikut ini: PAN mendapat 64 kursi (pemilu 2014) dan hanya memperoleh 51 kursi (pemilu 2019). PKS mendapat 51 kursi (pemilu 2014) dan hanya mendapat 49 kursi (pemilu 2019). Sedangkan PPP mendapat 24 kursi (pemilu 2014) dan 12 kursi (pemilu 2019) dan yang terakhir PBB mendapat 5 kursi (pemilu 2014) dan hanya mendapat 2 kursi (pemilu 2019).

Hasil analisa peneliti terhadap beberapa data yang dihimpun dari lapangan ada beberapa daerah yang suara Partai Amanat Nasional tidak bertambah secara signifikan seperti di Kabupaten Way Kanan dan Tanggamus. Namun untuk Kabupaten Mesuji suara PAN bertambah cukup lumayan dan berhasil meraih 4 kursi pada pileg 2014 dan 3 kursi pada pileg 2019. Menurut Sutanto, semua capaian ini bisa diraih berkat kerjasama dan kerja lama yang tidak mengenal jenuh dari struktur PAN baik yang duduk di Dewan maupun yang aktif di partai saja. Dengan mengedepankan visi dan misi besarnya, jauh dari praktik culas sehingga masyarakat akhirnya percaya bahwa partai ini bisa menjadi wadah aspirasi politik mereka dalam panggung demokrasi Indonesia. (S. dkk, personal communication, n.d., p. 12)

Berbeda dengan Mardinata, Ketua DPC PAN Mesuji Timur yang menceritakan tentang keberhasilan PAN Mesuji dalam meraih 3 kursi DPRD pada pileg 2019 menyebutkan diantara kunci suksesnya adalah militansi kader, kaderisasi yang masih terus berjalan, rekrutmen CAD dari kalangan tokoh masyarakat, mensosialisasikan visi dan misi ke masyarakat sertan dapat menjalankan visi dan

misi tersebut dengan baik dan yang terakhir adalah doa kepada Allah. (S. dkk, personal communication, n.d., p. 14) Lain halnya dengan PAN Lampung Utara, angket yang disebar menunjukkan bahwa keberhasilan PAN dalam mempertahankan jumlah kursi DPRD pada tahun 2019 silam tidak lepas dari strategi internal dan eksternal. Strategi internal berupa pola rekrutmen politik dengan mengedepankan tokoh personal serta latar belakang yang dimiliki agar bisa maksimal dalam berkhidmat bagi PAN. Adapun faktor eksternal berupa penggalangan massa, kampanye politik sesuai dengan jadwal yang ada, sosialisasi politik baik offline maupun online dan komunikasi politik. (Suryanef, 2018b, p. 320)

Analisa mendalam peneliti terhadap data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa PAN sebagai partai Islam masih komited dan istiqamah menjaga nilai-nilai perjuangan dengan tetap mengedepankan kaidah menang dengan elegan dan bersih, menjaga visi misi partai, menokohkan ulama dan ilmuwan, menjaga citra partai Islam yang didukung ormas Muhammadiyah dan tidak terlibat dengan praktik KKN dan politik pragmatis lainnya yang kerap dipakai oleh calon lain.

Lalu bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selalu mendeklarasikan dirinya sebagai partai dakwah, partai bersih dan peduli, partai anak muda dan terbuka? PKS sebagai salah satu kontestan pemilu 2019 silam memantapkan langkah politiknya dengan mengambil posisi sebagai oposisi pada Kabinet Jilid I Jokowi bersama beberapa partai lainnya. Kegagalan PKS untuk menembus angka elektoral dua digit pada pemilu 2014 menjadi pelajaran berharga bagi partai dakwah ini untuk mencoba peruntungannya di medan politik dengan melakukan berbagai macam manuver dan pasang strategi guna mendongkrak capaian elektoral parlemen.

Bagi PKS, pelajaran di masa lalu yang sulit dan tidak menentu mesti disikapi dengan cerdas karena faktanya pada pemilu 1999 saat masih bernama Partai Keadilan (PK) parpol ini hanya meraih 1,36 persen suara nasional setara 7 kursi di DPR-RI. Setelah berganti nama menjadi PKS dan ikut Pemilu 2004 PKS mendapat 7,34 persen suara setara dengan 45 kursi di DPR-RI. Nasib PKS agak lebih baik pada pemilu 2009, dimana ia meraih 7,88 persen suara setara dengan 57 kursi DPR-RI, dan kembali menurun pada pemilu 2014 dengan raihan 6,79 persen setara 40 kursi parlemen.

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada tahun 2019 silam PKS berhasil mengangkat derajat elektoralnya dan berhasil meraih suara sebanyak 11.493.663 suara (8,21%) dan berada pada urutan keenam. Aku Mardani Ali Sera, kenaikan ini tidak bisa dilepaskan dari sikap konsisten PKS dalam mendukung paslon Prabowo-Sandi dalam pilpres sehingga mendapat limpahan elektoral yang cukup lumayan dari pemilu sebelumnya. Menurut Mardani, program kerja dan janji politik PKS seperti SIM seumur hidup, gratis pajak motor menjadi salah satu pemicunya selain militansi kader yang tidak diragukan lagi.

Pengakuan Mardani juga dipertegas oleh Ujang Komarudin yang menegaskan bahwa keberhasilan PKS dalam menambah suara dan kursi pada pemilu 2019 silam karena permainan cantik dan strategi menarik dari PKS ditengah munculnya isu perpecahan internal yang cukup menguras militansi kader terutama di daerah. Pungkas Ujang, narasi-narasi yang dilontarkan PKS jauh lebih menarik

dan menyoar banyak orang walaupun terus diserang oleh lawan politik seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selalu membawa isu kontra narasi namun pada akhirnya masyarakat lebih memilih yang sudah nyata ketimbang kata yang belum berfakta.

Kesimpulan Ujang diperkuat oleh Adi Prayitno seorang pengamat politik dari UIN Jakarta. Menurut Adi, keberpihakan masyarakat kepada PKS karena partai ini dianggap lebih tegas dalam sikap politiknya terhadap pemerintah dibandingkan partai koalisi non pemerintah lainnya seperti PAN dan Demokrat. Selain itu, PKS memiliki kader yang militan dan berkampanye di media sosial dengan tampilan menarik dan menjadi *trending topic*. (Riyan, 2019, p. 21)

Pasca Munas PKS 2017, Muhammad Sohibul Iman menegaskan bahwa salah satu strategi untuk mencapai 12% suara pada pileg 2019 PKS melakukan penjarangan caleg sejak dini yaitu sejak 2017 sehingga caleg memiliki kesempatan luasa untuk berinteraksi dengan warga hingga waktu pileg datang. Menurutnya, selama ini PKS melakukan penjarangan dengan waktu yang sangat dekat dengan pemilihan sehingga caleg tidak memiliki waktu yang cukup.¹

Untuk Lampung, daerah Lampung Tengah termasuk daerah lumbung suara di Lampung pada pemilu 2019 dimana dari total 6.101. 544 pemilih yang masuk daftar terpilih tetap, sebanyak 951.018 adalah pemilu yang berada di Lampung Tengah. Jumlah itu termasuk tertinggi di Lampung. Pembandingnya adalah kota Bandar Lampung yang dikenal sebagai kota dengan penduduk berjumlah 646.245. Begitu juga Kabupaten Lampung Selatan yang wilayahnya mulai dari Pelabuhan Bakahueni hingga Natar, Jati Agung dll dengan jumlah pemilih hanya sebesar 764.861. Dengan jumlah terbesar dibandingkan kabupaten/kota di Lampung lainnya maka sangat wajar jika kursi diperebutkan di wilayah ini untuk DPRD Lampung terbanyak 12 kursi, pertarungan antar parpol pun dan caleg pun sangat keras dan ketat.

Data yang dihimpun oleh peneliti dan tim di Lampung Tengah dari bapak Anton Robani yang didampingi Ketua Humas DPD PKS Lampung Tengah M. Ghofur mengatakan, program yang akan dilakukan 2019 adalah menggairahkan pertemuan secara rutin antara pengurus DPC dengan pengurus DPD kemudian menjalani silaturahmi antara anggota agar persatuan dan kesatuan menjadi lebih kuat. Dia juga membeberkan mekanisme prekrutan para calon kader yang bakal dilakukan ke depan. PKS melakukan pembentukan karakter para calon kader-kader PKS Untuk berdakwah agar bisa menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam.

Dalam salah satu kesempatan Sekjen PKS Lampung, Ade Ibnu Utami meminta kepada para pengurus DPD PKS Lampung Tengah yang baru dilantik agar segera bekerja karena Lampung Tengah menjadi pilot project system management partai dakwah bagi DPD se-Lampung. Menurutnya, hal ini lantaran dalam mewujudkan tujuan partai terletak pada kualitas sumber daya manusia yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan pengurus DPD PKS Lampung tengah telah memilikinya.

¹ Dyah Ratna Meta, "PKS Pakai Sistem Pencalegan Dini Di Pemilu 2019," *Republika.Co. Id*, 2017, 17, <https://republika.co.id/berita/nxddd9g384/pks-pakai-sistem-pencalegan-dini-di-pemilu-2019>.

Di tempat yang berbeda, hasil wawancara tim peneliti di Kabupaten Tanggamus mendapati bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam upaya pemenangan politik pada pemilihan umum 2019 di Tanggamus, terdapat berbagai faktor yang membuat PKS bisa memperoleh dukungan yang cukup signifikan disetiap berbagai kompetisi pemilu. PKS adalah partai dakwah, realisasi program kerja partai banyak melakukan interaksi sosial langsung dengan masyarakat. PKS mempunyai manajemen partai yang baik, kelembagaan politik yang professional serta rekrutmen politik yang terstruktur dan melakukan pemasaran politik melalui produk-produk politik. Pada saat mendekati momen pemilu PKS melakukan aksi *door to door* dengan masyarakat untuk mengenalkan aleg mereka dalam upaya mendapatkan suara dari masyarakat, menyapa dengan bahasa agama dan bahasa rasa empati dan jiwa sosialita.

Berbeda dengan di Tulang Bawang, hasil analisa angket yang disebar peneliti melalui tim menunjukkan bahwa strategi pemenangan Partai PKS berupa komunikasi politik apik saat kampanye. Komunikasi politik dipandang perlu dibangun agar orang lain mau ikut berpartisipasi dengan kesadaran umum terhadap pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi dalam menghadapi persoalan bangsa dan negara, kemudian mengokohkan kredibilitas dan efektivitas komunikasi antara partai politik dan masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai sebuah perubahan sosial yang direncanakan banyak melibatkan unsur-unsur sosial termasuk para pemeluk agama baik sebagai subyek maupun obyek.

PKS memang termasuk partai miskin iklan di televisi dan media nasional lainnya namun PKS kaya dengan ide dan cara untuk melakukan marketing politik termasuk pada pileg 2019 silam. Di media sosial, kampanye-kampnye PKS cukup massif dengan membentuk fanspage lewat akun facebook, media sosial online untuk mengambil alih simpati kaum milenial beserta para komunitas supaya berinteraksi di akun facebook partai PKS. Hasil analisa pengurus menunjukkan bahwa strategi PKS kali ini cukup efektif dilakukan terlihat bahwa akun PKS Tulang Bawang memiliki 646 likes, dan bahkan kelompok pemudanya pun membentuk fanspage sendiri yang bernama PKS Muda Tulang Bawang akun tersebut memiliki 686 likes. Meskipun terbilang sedikit hanya ratusan likes saja tetapi para fanspage kedua akun tersebut selalu aktif mendukung dan membangun sistem kinerja partai PKS kepada khalayak lewat postingannya. Bukan hanya melalui berbagai media saja tetapi partai PKS juga turut menyusun strategi untuk terjun lapangan secara langsung sebagai bentuk dari kepedulian partai terhadap kehidupan sosial, jadi tidak melulu soal politik saja tapi juga memperhatikan segala bidang kehidupan di masyarakat.

Strategi Pemenangan PKS dari tahun ke tahun standar tidak banyak perubahan, ini dikarenakan partai PKS yang merupakan partai dakwah selalu mengedepankan kehidupan sosial. Yang dilakukan partai PKS sebagai strategi pemenangan di antaranya memperhatikan kerja kader diiringi dengan dakwah, seperti mengadakan pengajian di masjid, baksi sosial, dan memberikan bantuan untuk kepentingan masyarakat. Kerja-kerja dakwah dan politik yang berkelanjutan ini nampaknya menjadi asbab utama suksesnya PKS dalam mempertahankan kiprah politiknya hingga saat ini termasuk saat terjadinya wabah covid 19.

Berdasarkan analisa data dan fakta diatas dapat ditarik satu kesimpulan awal bahwa baik Partai Amanat Nasional (PAN) maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

dalam menjalankan strategi marketingnya berupa untuk menghadirkan masalah buat partai dan bangsa dengan cara melakukan proses pendidikan politik, kampanye cerdas dengan cara-cara yang elegan dan berkualitas, adu ide dan gagasan, memberi solusi sesuai kemampuan yang ada, komitmen dengan janji politik dan berpihak kepada kondisi masyarakat. Walhasil, rakyatpun memberikan kepercayaan dan pilihannya walaupun jumlah suara berkurang namun jumlah kursi masih relative stabil dibandingkan dengan dua partai lainnya PPP dan PBB. Disisi lain, adalah mafsadah yang harus ditolak oleh PAN dan PKS yaitu *mafsadah* kemiskinan yang terus menghimpit rakyat ulah dari kebijakan yang tidak pro rakyat sehingga kedua partai kerap melontarkan pelolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap membebani masyarakat seperti kenaikan BBM, IKN, maraknya pejabat negara terjerat OTT KPK karena KKN. Tidak hanya sebatas itu, PAN dan PKS dinilai masih relative komited untuk menjalankan agenda politik yang bercirikan nilai-nilai Islam yang santun, ramah dan berusaha menghadirkan Islam rahmatan lil' alamin, tidak banyak terlibat kasus KKN.

Kesimpulan

Sebagai partai politik yang mengaku berafiliasi kepada gerakan keumatan semisal PAN dan PKS tentu tidaklah mudah untuk terus bersaing dan eksis dalam setiap tahapan kontestasi baik legislatif dan juga pilkada. Segmentasi keumatan yang diusung oleh partai berhaluan ideologi agama tidak selalu memberi jalan mudah untuk mereka bermain di semua ruang kampanye dengan gaya bebas norma dan etika seperti yang biasa dilakukan oleh partai politik umumnya. Disinilah tantangan langkah progressif strategis PAN dan PKS dengan tetap menjaga keseimbangan antara nilai masalah politik dan norma *siyasah syar'iyah*.

Dalam rangka sukses pemilu legislatif yang diselenggarakan secara serentak dengan pilpres PAN dan PKS memiliki beberapa bentuk pendekatan dengan masyarakat dalam bingkai politik pencerdasan yang membawa masalah baik bagi partai maupun pemilih sebagai objek politik dan negara sebagai tujuan akhir berpolitik. Aksi *door to door*, bakti sosial, temu tokoh, aksi simpatik, advokasi politik, sosialisasi massif di medsos, pendekatan tokoh dan rekrutmen calon anggota dewan yang berkualitas serta usaha gigih dari semua unsur partai dan simpatisan menjadi senjata utama bagi PAN dan PKS untuk bisa bertahan dengan perolehan kursi yang ada walau dengan kondisi internal yang sangat sulit. Bagi PAN dan PKS tidak mengalami nasib seperti saudaranya di PPP dan PBB saja sudah menjaduh sebuah capaian besar keduanya saat pileg 2019 silam.

Dari sudut pandang kaidah ushuliyah *Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih* (menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) bagi PAN dan PKS adalah bahwa PAN dan PKS lebih mengedepankan pendekatan persuasif, silaturahmi intensif kepada para calon pemilih, melakukan pencerdaan politik dengan mengedepankan penyampaian visi dan misi partai serta program caleg. PAN dan PKS tidak mau terlibat dengan pendekatan pragmatis yang bisa lebih cepat menuai dukungan semisal membagi-bagikan sembako, money politik, umbar janji-jani manis seperti yang dilakukan oleh partai lain karena keduanya berkayakinan bahwa cara ini adalah mafsadah. Cara berpolitik dengan pendekatan pragmatis adalah gambaran dari sebuah *mafsah* dalam kontestasi demokrasi. Keduanya berkeyakinan apalah artinya mendapat keuntungan sesaat (*jalb mashalih*) dengan cara merusak tatanan sosial dan moral dalam

berpolitik sehingga dengan demikian harus ada sikap tegas mengutamakan menolak kemudaratan ((*dar'u al-mafasid*) lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan sesat (*jalb al-mashalih*) sebagaimana tuntunan kaidah ushuliyah yang sudah ditepkan oleh ulama dan juga menjadi prinsip dalam berpolitik.

Daftar Pustaka

- Abdissalam, I. (1991). *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-'Anam* (Vol. 1). Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyah.
- Admin Liputan6.com. (n.d.). Gugatan 30 Miliar Ke PKS Kandas di MK, Ini Kata Fahri Hamzah. [Http://Www.Liputan6.Com](http://Www.Liputan6.Com).
- al-Qarafi, S. (1367). *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq* (Vol. 4). 'Alam al-Kutub.
- al-Subki, T. (1995). *Al-Ibhaj Fi Syarh al-Minhaj* (Vol. 3). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Syathibi, I. bin M. (1997). *Al-Muwafaqat* (Vol. 3). Dar Ibn Affan.
- al-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Qawai'd al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- dkk, S. (n.d.). *Wawancara Pengurus PAN* [Personal communication].
- Editor Harian Momentum. (2019, November 13). Ketua PAN Lampung Dimosi Tidak Percaya. [Https://Www:HarianMomentum.Com](https://Www:HarianMomentum.Com).
- Ekawati, E. (2015). Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1). <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/524/332>
- Hawari, N. (2020). Menelisik Langkah Strategis PKS Tulang Bawang Pada Pemilu Tahun 2019. *Jurnal TAPIS*, 16(2), 1–20.
- Mayrudin, Y. M. (2017). DINAMIKA PARTAI POLITIK DAN POSITIONING IDEOLOGI: STUDI TENTANG PERGESERAN POSITIONING IDEOLOGI PARTAI-PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014. *Journal of Governance, December 2017 Volume 2, No. 2 163, 2(2)*.
- MHD. (2017, Agustus). PAN Targetkan Dua Digit Pada 2019. <Http://Www.Kompas.Id>.
- Rahadian, L. (2018, April 25). “Politik Masjid” Amin Rais dan Rendahnya Elektabilitas PAN. <Http://Www.Tirto.Id>.
- Ratna Meta, D. (2017). PKS Pakai Sistem Pencalegan Dini di Pemilu 2019. *Republika. Co.Id*. <https://republika.co.id/berita/nxdd9g384/pks-pakai-sistem-pencalegan-dini-di-pemilu-2019>

- Retaduari, E. A. (2018, Desember). Mundur, 2 Elite PAN: Ketum Salah Urus Partai! *News.Detik.Com*.
- RH, P. (2008, July 9). Amien Rais Diminta Besarkan Partai Matahari Bangsa. *Http://Www.Antaraneews.Com*.
- Riyan. (2019). Buah Manis Ketegasan PKS Jadi Oposisi. *Cnnindonesia.Com*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190520180040-32-396591/buah-manis-ketegasan-pks-jadi-oposisi>
- Riyanto, A. (2020). Mengapa Partai Islam Belum Pernah Menang?: Path Dependence Repetition Kekalahan Partai Islam Indonesia Dalam Pemilu Legislatif 1955 hingga 2019. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2).
- Sofyan, A. (2014). *Etika Politik Islam*. CV Pustaka Mulia.
- Suryanef, L. (2018a). Strategi Partai Amanat Nasional Dalam Memenangkan Pemilihan Umum Legislatif 2019. *Journal of Civic Education*, 4(1), 317–324.
- Suryanef, L. (2018b). Strategi Partai Amanat Nasional dalam Memenangkan Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi di Dapil II Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman. *Jurnal of Civic Education*, 4(1).
- Suwandi Sumartias, E. N. (2017). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Keterbukaan Ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43–52.
- Widiyanto, E. (2018, Oktober). Ada Apa Dengan PKS Jelang Pemilu 2019? *Http://Www.Jrepublika.Co.Id*.
- Zuhdi, M. (2021). Strategi Kampanye Caleg Kiagus Ishak (PAN) dan Syafruddin (PPP) Dalam Pileg 2019 di Kota Palembang. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 2(1), 55–67.